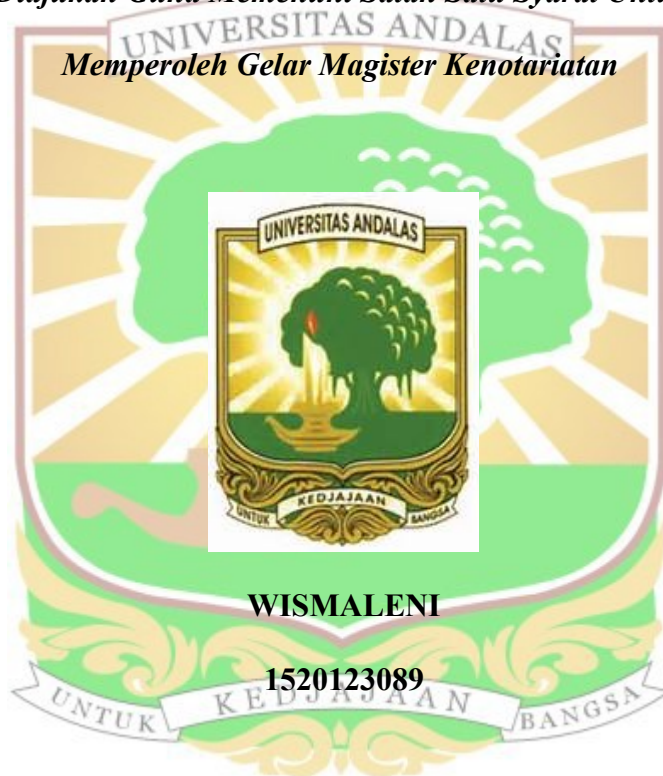


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMALSUAN
AKTA SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUS DALAM
PUTUSAN NOMOR:137/Pid.B/2016/PN.Pbr**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Pembimbing I : Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH

Pembimbing II : Dr. Suharizal, SH, MH

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMALSUAN
AKTA SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUS PADA PUTUSAN
NOMOR:137/Pid.B/2016/PN.PBR
WISMALENI**

ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum yang bertugas dan berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana diatur dalam undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya profesi notaris sangat rawan berhadapan dengan hukum Pidana dan bisa dijadikan tersangka hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.PBR. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah putusan hakim dalam perkara ini telah meberikan kepastian hukum dan keadilan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim menjadikan notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam putusan tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pembahasan: 1) Dalam putusan perkara nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PBR, tidaklah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi notaris karena jabatan notaris telah jelas diatur dalam UUJN yang merupakan payung hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang mana dalam UUJN tersebut jelas menegaskan bahwa notaris tidak dapat dituntut secara pidana, UUJN mengatur secara tegas tentang sanksi perdata, administrasi dan kode etik. 2) Yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun delapan bulan kepada terdakwa karena hakim menilai terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran tandatangan dalam akta tersebut, dan pelanggaran terhadap unsur-unsur pada pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa tentang pemalsuan akta autentik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Notaris, Kepastian hukum, dan Keadilan.

**LEGAL PROTECTION OF NOTARIES ON THE FORGERY
OF A DEED AS STATED IN VERDICT
NUMBER: 137/PID.B/2016/PN.PBR.**

By: Wismaleni

ABSTRACT

Notary is one of general officials has responsibility and authority in writing an authentic deed and other authorities as stated in the constitution. However, notary is also vulnerable to the criminal law and possible to be a suspect. It is stated in verdict number 137/PID.B/2016/PN.PBR. In this thesis, there are 2 research questions, they are: 1. Has the judge's decision distributed the provision of law for the notary? 2. What is the basic of law consideration for the judge in deciding that notary has responsibility criminally in that decision? The law research methods for this research are normative juridical, legislation and case approaches. The discussions of the research are : 1) In verdict number 137/PID.B/2016/PN.PBR, it is not stated the provision of law and justice for the notary because the notary position has been regulated clearly in UUJN which is the legal protection for the notary to carry out their duties and authority. In the UUJN, it is clearly asserted that a notary can not be prosecuted criminally and that UUJN sets strickly about civil sunction, administration and code of ethics. 2) the basic of law consideration for the judge to impose the penalties for 1 year and 8 month for the defendant is because the judge assumes that the defendant is not able to prove the authenticity of the signature in the deed and the violation of the elements in the article 264 verse (1) KUHP has been fulfilled by defendant, that is the forgery of authentic deed.

Keywords: *the notary legal protection, the provition of law and justice.*

